

PERTEMUAN 9

LATIHAN: ANALISIS IMPLEMENTASI “KASUS TERPILIH”

Dr. Novita Tresiana

PILIH SALAH SATU KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LAKUKAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN LANGKAH-LANGKAH SBB:

LANGKAH PERTAMA ANALISIS: MENDIFINISIKAN substansi permasalahan kebijakan yang harus ditangani.

Menurut, Grindle, terkait dengan content atau substansi kebijakan, setidaknya ada enam faktor yang harus diamati dalam melakukan analisa kebijakan.

Enam faktor itu adalah:

1. **Kepentingan yang dipengaruhi oleh substansi kebijakan yang akan diimplementasikan.** Ketika kebijakan dipahami sebagai sebuah intervensi terhadap suatu situasi yang telah ada sebelumnya, harus disadari bahwa dalam situasi tersebut sudah ada sistem yang berjalan, lengkap dengan nilai dan aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Aktor-aktor tersebut tentu saja memiliki kepentingan dengan situasi yang ada pada saat itu. Jika keberadaan keputusan kebijakan yang akan diimplementasikan ternyata berimplikasi negatif dengan kepentingannya, tentunya akan muncul resistensi dari para aktor tersebut, dan bisa menggagalkan proses implementasi dan tercapainya tujuan kebijakan.
2. **Tipe manfaat yang diterima.** Tipe manfaat dari kebijakan yang diterima juga berpengaruh pada keberhasilan proses implementasi dan pencapaian dampak kebijakan yang diinginkan. Setelah kita menyadari bahwa dalam setting di mana kebijakan akan diimplementasikan terdapat banyak aktor dengan kepentingannya masing-masing, tentu kita, sebagai analis, juga harus sadar bahwa masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.
3. **Derajat perubahan yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan yang akan diimplementasikan.** Analis harus memahami derajat potensi perubahan yang

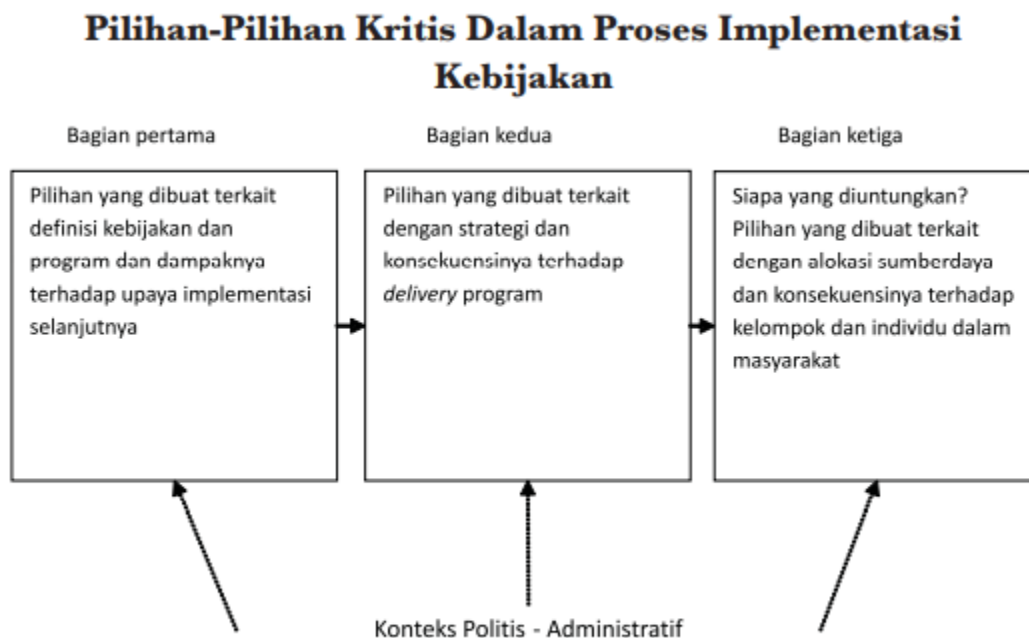
ditimbulkan sebagai akibat dari intervensi kebijakan terhadap situasi yang ada. Dalam banyak kasus, substansi kebijakan yang memproyeksikan perubahan yang mendasar terhadap situasi yang ada, cenderung mendapatkan resistensi yang lebih kuat, sehingga memiliki potensi yang lebih besar untuk gagal. Analis harus mampu membaca kemungkinan ini untuk bisa membangun sebuah desain implementasi kebijakan yang aplikabel.

4. **Letak pengambilan keputusan.** Analis harus memperhitungkan konsekuensi dari isi formula kebijakan terhadap letak pengambilan keputusan untuk implementasi kebijakan dan siapa saja yang akan menjadi aktor kunci pengambilan keputusan pada proses implementasi. Ingat, proses implementasi tidak hanya proses administratif yang tinggal menjalankan apa yang sudah dinyatakan dalam formula, tetapi juga melibatkan proses tawar menawar, akomodasi, dan konflik dengan aktor yang beragam.
5. **Implementor program.** Analis perlu memahami dan memperhitungkan konsekuensi dari keputusan tentang siapa yang akan menjadi implementor program. Selain berkaitan dengan masalah teknis, seperti kompetensi dari si implementor, untuk faktor ini seorang analis perlu memahami bahwa di antara para implementor program, baik itu di kalangan agensi aparatus pemerintah maupun kelompok-kelompok di masyarakat, seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan. Implementasi kebijakan bisa gagal, atau memberikan hasil yang tidak maksimal karena adanya tarik menarik-kepentingan ini. Karenanya, dalam membangun desain implementasi kebijakan, khususnya dalam merekomendasikan implementor program, seorang analis perlu jeli dan peka dalam melihat relasi antar aktor kebijakan.
6. **Sumber daya yang tersedia.** Implementasi kebijakan mengimplikasikan adanya kebutuhan akan resource. Tingkat kebutuhan akan resource seringkali juga dipengaruhi oleh pilihan strategi dan instrumen implementasi kebijakan. Dalam kalkulasi rasional, pilihan strategi dan instrument kebijakan biasanya juga harus dianalisa dalam relasinya dengan variabel sumberdaya yang tersedia, disamping variabel efektivitas dari berbagai pilihan strategi dan instrument implementasi yang tersedia.

LANGKAH KEDUA ANALISIS, yaitu mengkontekstualisasikan tujuan tersebut dengan kondisi dan situasi konkrit di mana keputusan kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Menurut Grindlle, dalam menganalisa konteks, analis perlu memperhitungan hal-hal sebagai berikut: Pertama, kontekstualisasi tujuan kebijakan dalam setting yang lebih spesifik tersebut akan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan yang dimaksudkan bisa tercapai melalui proses implementasi dalam setting tersebut. Ini penting untuk dilakukan mengingat

tujuan kebijakan ditetapkan cenderung dengan mengabaikan keragaman dan kompleksitas yang ada di lapangan. Karena itu, dalam proses implementasinya, harus dilakukan adjustment dengan situasi konkrit yang dihadapi.

LANGKAH KETIGA ANALISIS: ALTERNATIF IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, yaitu menentukan alternatif-alternatif implementasi kebijakan. Kalibrasi antara tujuan kebijakan dan situasi konkrit akan menghasilkan asumsi. Asumsi ini akan menjadi dasar bagi analisis dalam membangun model kausal. Berdasarkan asumsi dan model kausal tersebut, seorang analis bisa mulai menginventarisir berbagai alternatif instrumen implementasi yang dianggap relevan.



Diadaptasi dari: Grindle, Merilee s. ed. (1980) *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, hal. 11

Tugas: Kelompok (7 Kelompok)

Waktu: 1 Minggu

Uploud : Siakadu dan VClass (Pemberitahuan melalui WA)